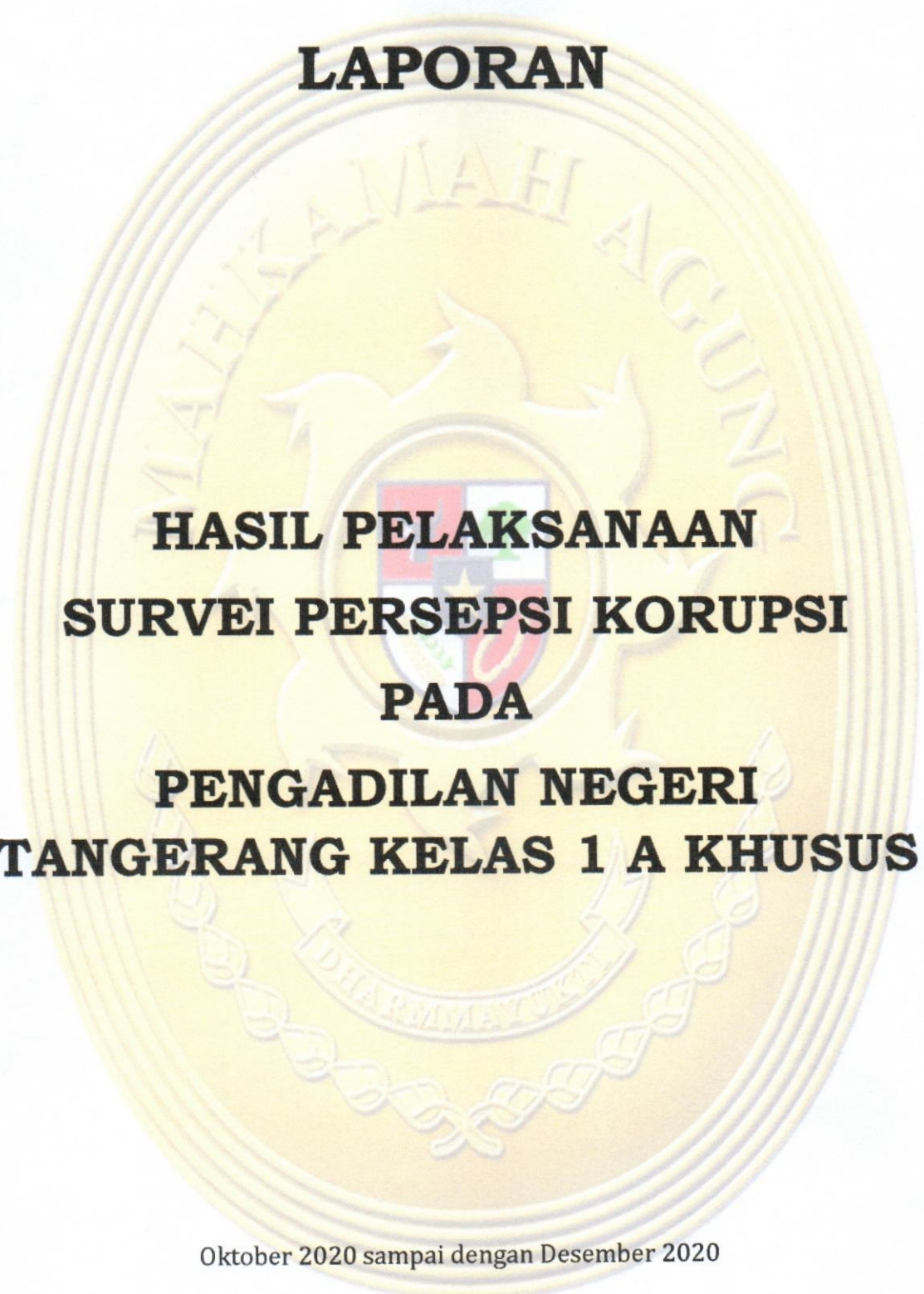


LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI
TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS**

Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KELAS 1 A KHUSUS**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017**

Disahkan di Tangerang,
Pada Hari , Januari 2021

Quality Management Reprerentative

Ketua Tim Survei

SUTARJO, S.H.,M.H.
Nip. 19671127 199212 1 001

MARTHIN TURNIP, S.H.,M.H.
Nip. 198203262001121001

**KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KELAS 1 A KHUSUS**

H. MINANOER RACHMAN, SH.,MH.
Nip. 19660601 199212 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja.....	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan pelaksanaan	7
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil responden.....	9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	12
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	21
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	24
BAB IV	25
PENUTUP	25
4.1. Kesimpulan.....	25
4.2. Rekomendasi	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

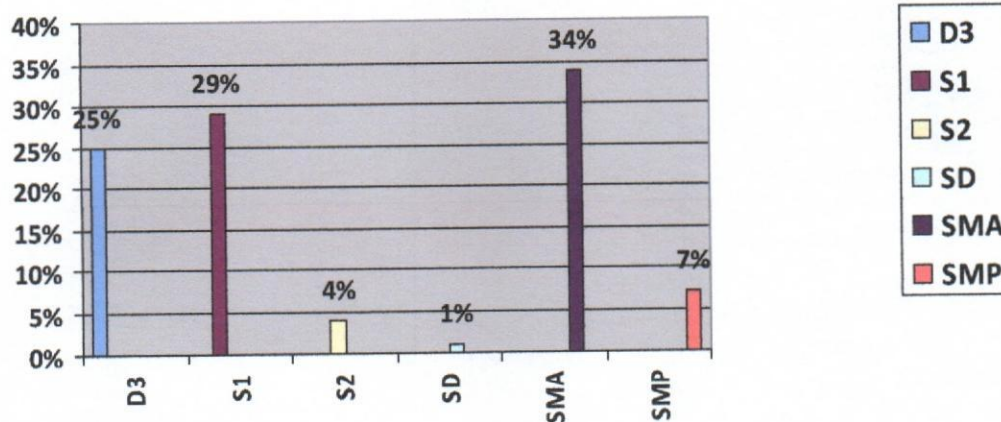
3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Dasar dan Menengah.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No.	Pendidikan	Nilai	%
1	D3	28	25%
2	S1	32	29%
3	S2	5	4%
4	SD	1	1%
5	SMA	38	34%
6	SMP	8	7%
	Total	112	100%



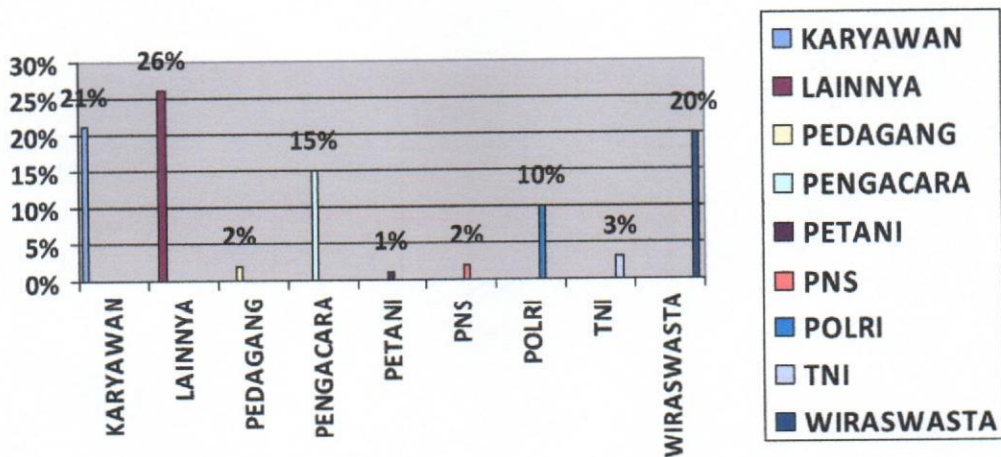
Tingkat pendidikan responden

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 28 % responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri tangerang memiliki pekerjaan sebagai Pekerjaan Lainnya.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No.	Pekerjaan	Nilai	%
1	KARYAWAN	24	21%
2	LAINNYA	29	26%
3	PEDAGANG	2	2%
4	PENGACARA	17	15%
5	PETANI	1	1%
6	PNS	2	2%
7	POLRI	11	10%
8	TNI	3	3%
9	WIRASWASTA	23	20%
	Total	112	100%



3.1.3. Domisili responden

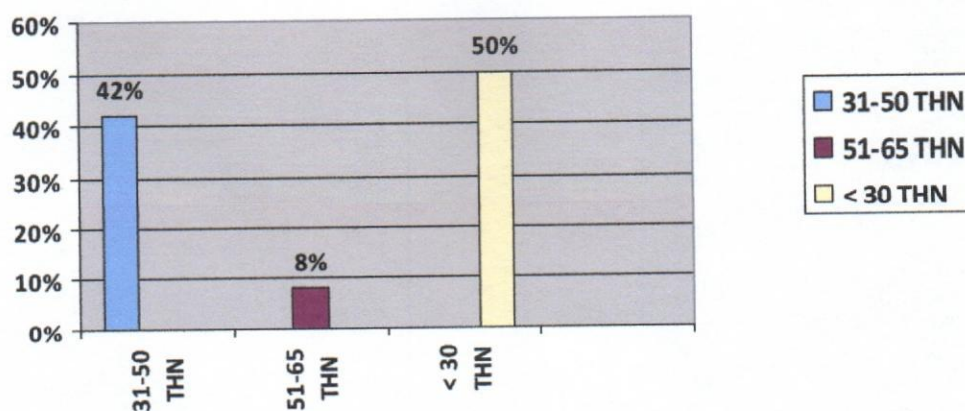
Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domilisi, responden paling banyak berasal dari Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang

3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 21 tahun s/d 60 tahun. Bagi kelompok usia di atas 55 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 21 tahun.

Tabel 7.
Usia responden

No.	Usia	Nilai	%
1	31-50 THN	47	42%
2	51-65 THN	9	8%
3	< 30 THN	56	50%
	Total	112	100%



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **3.76**

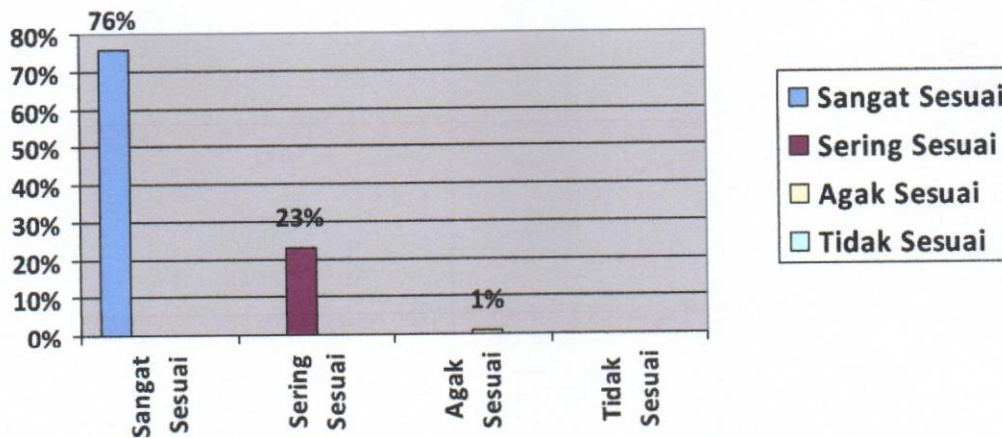
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari Korupsi

Tabel 9.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Sangat Sesuai	90	76%
2	Sering Sesuai	20	23%
3	Agak Sesuai	1	1%
4	Tidak Sesuai	0	0%
	Total	112	100%

Indeks pada indikator manipulasi peraturan



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **3.86**

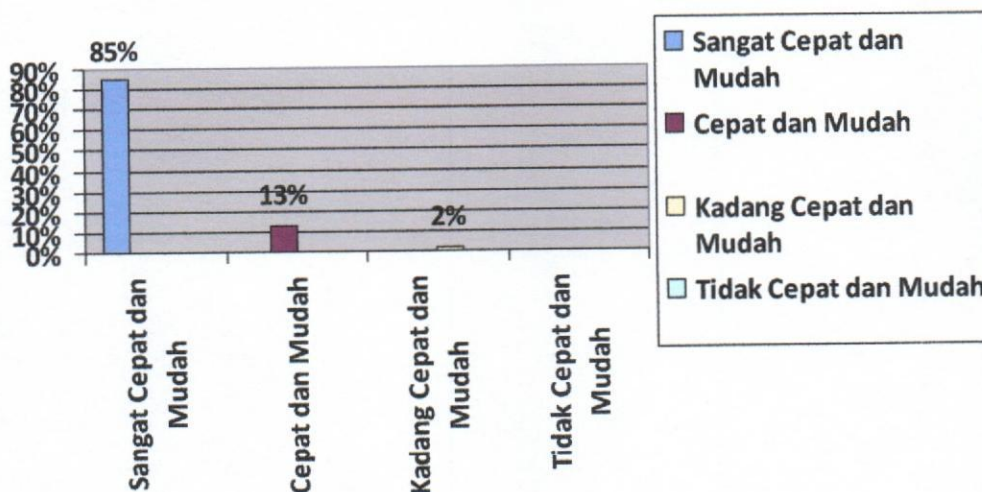
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang bersih dari Korupsi.

Tabel 10.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Sangat Cepat dan Mudah	99	85%
2	Cepat dan Mudah	11	13%
3	Kadang Cepat dan Mudah	2	2%
4	Tidak cepat dan mudah	0	0%
	Total	112	100%

Indeks pada penyalahgunaan jabatan



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada

indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **3.76**

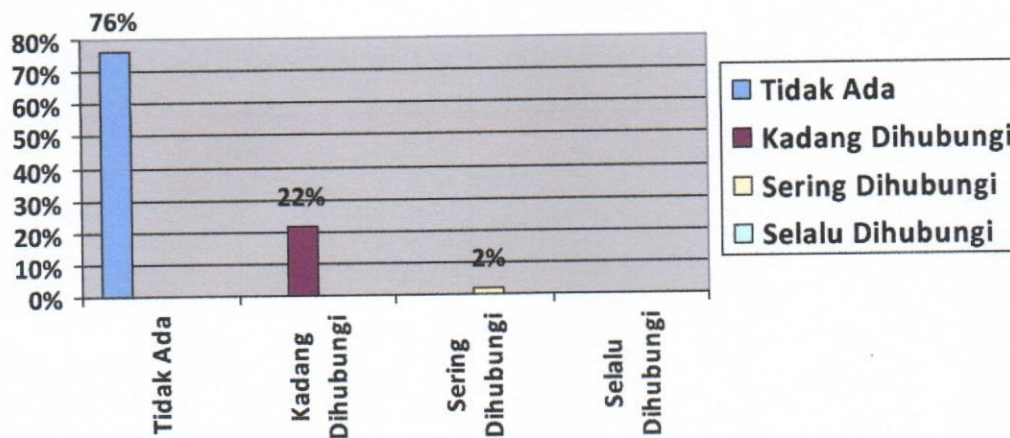
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari Korupsi.

Tabel 11.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Tidak Ada	86	76%
2	Kadang Dihubungi	24	22%
3	Sering Dihubungi	2	2%
4	Selalu Dihubungi	0	0%
	Total	112	100%

Indeks pada indikator menjual pengaruh



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3.78**

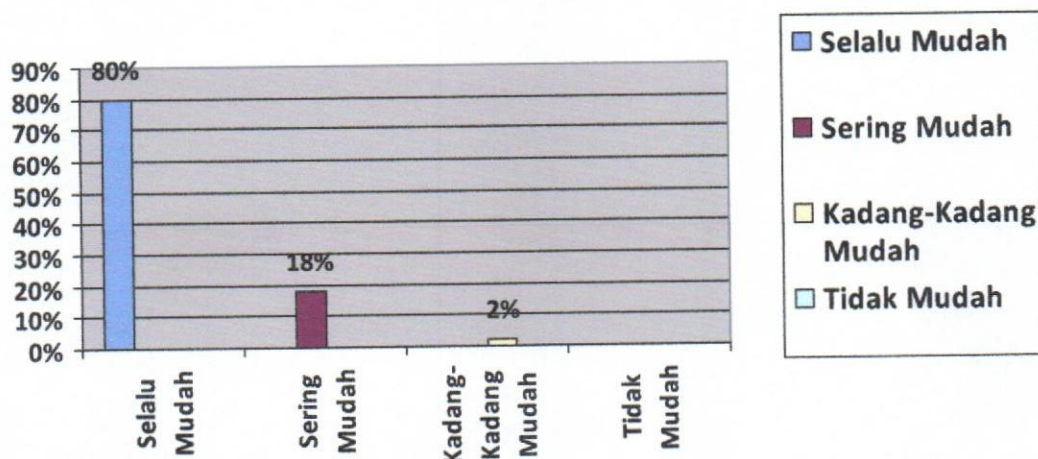
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang cukup bersih dari Korupsi.

Tabel 12.

Indeks pada indikator transaksi biaya

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Selalu Mudah	88	80%
2	Sering Mudah	22	18%
3	Kadang-Kadang Mudah	2	2%
4	Tidak Mudah	0	0%
	Total	112	100%

Indeks pada indikator transaksi biaya



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3.84**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja

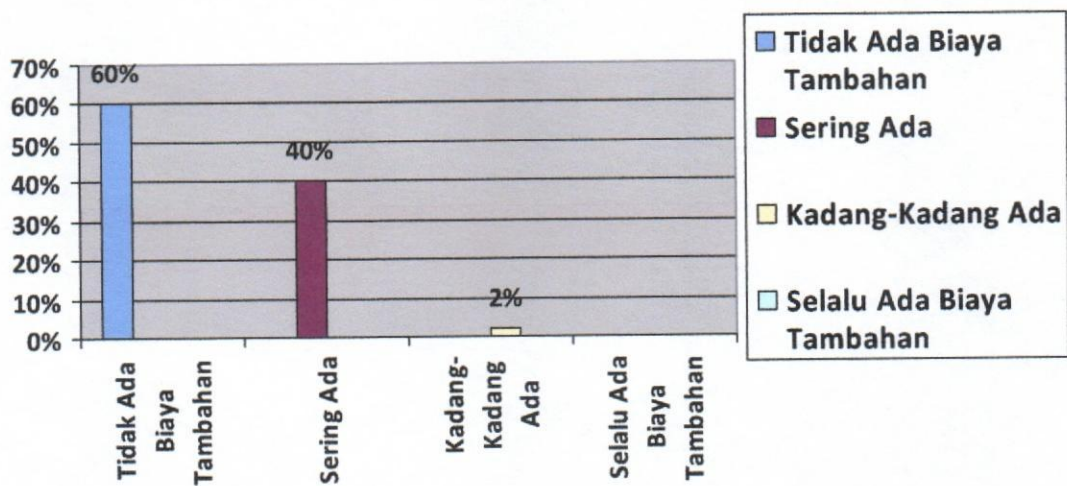
pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari Korupsi

Tabel 13.

Tabel indeks pada indikator Tambahan Biaya

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Tidak Ada Biaya Tambahan	95	86%
2	Sering Ada	15	12%
3	Kadang-Kadang Ada	2	2%
4	Selalu Ada Biaya Tambahan	0	0%
	Total	112	100%

Tabel indeks pada indikator Tambahan Biaya



3.2.6. Indikator Hadiah

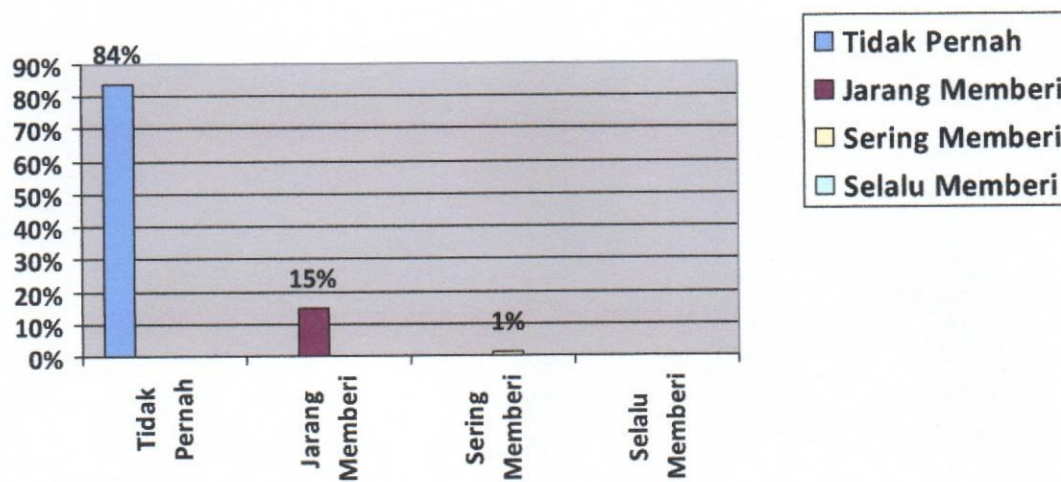
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **3.83**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari Korupsi

Tabel 14.
Indeks pada indikator Hadiah

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Tidak Pernah	94	84%
2	Jarang Memberi	17	15%
3	Sering Memberi	1	1%
4	Selalu Memberi	0	0%
	Total	112	100%

Indeks pada indikator hadiah



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3.87**

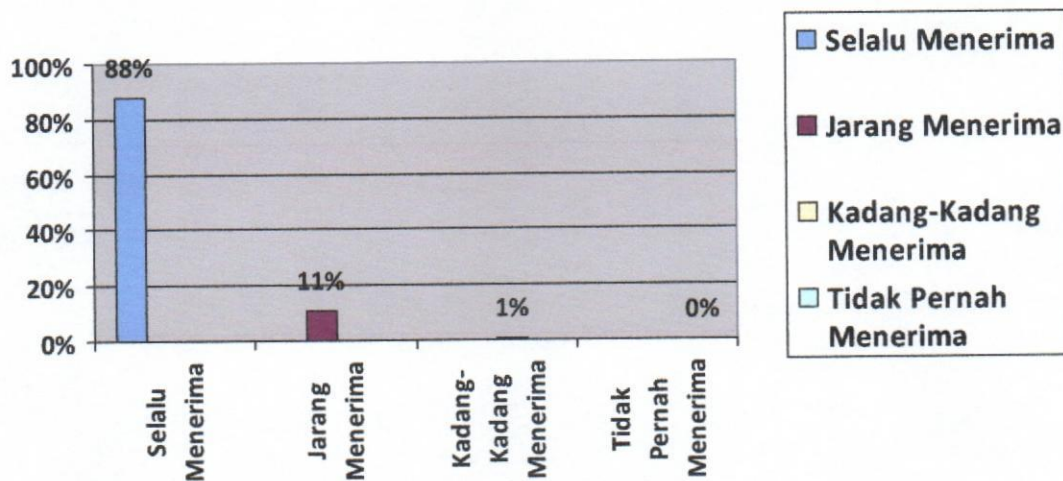
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari Korupsi

Tabel 15.

Indeks pada Transparansi Biaya

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Selalu Menerima	99	88%
2	Jarang Menerima	12	11%
3	Kadang-Kadang Menerima	1	0%
4	Tidak Pernah Menerima	0	1%
	Total	112	100%

Indeks pada Transparansi Biaya



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **3.79**

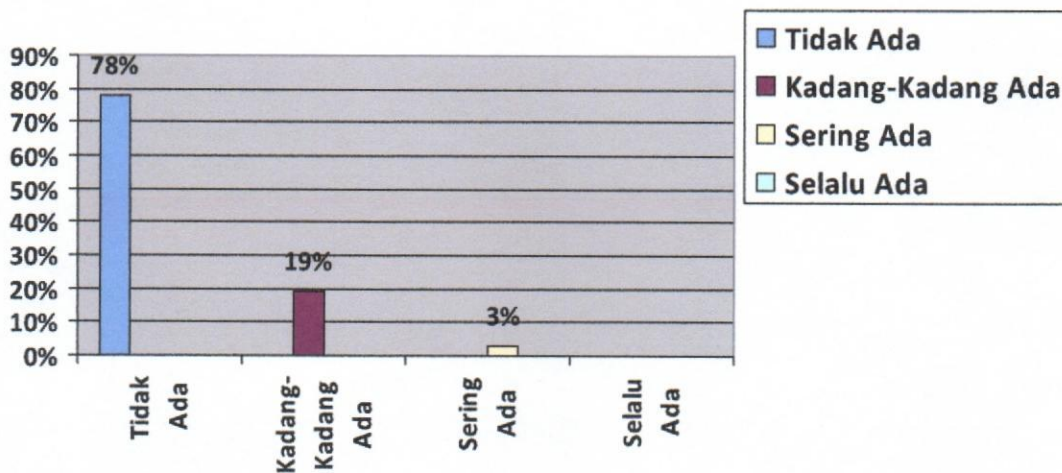
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari Korupsi

Tabel 16.

Indeks pada indikator percaloan

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Tidak Ada	92	78%
2	Kadang-Kadang Ada	17	19%
3	Sering Ada	3	3%
4	Selalu Ada	0	0%
	Total	112	100%

Indeks pada indikator Percaloan



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **3.86**

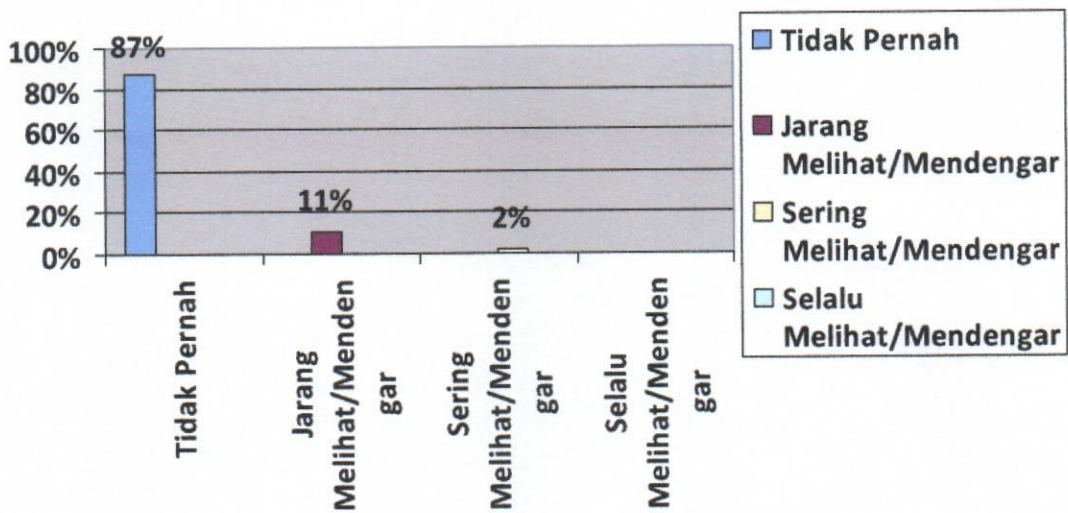
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 17.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Tidak Pernah	99	87%
2	Jarang Melihat/Mendengar	11	11%
3	Sering Melihat/Mendengar	2	2%
4	Selalu Melihat/Mendengar	0	0%
	Total	112	100%

Indeks pada indikator perbuatan curang



3.2.10. Indikator Perbuatan Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **3.90**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Bersih dari

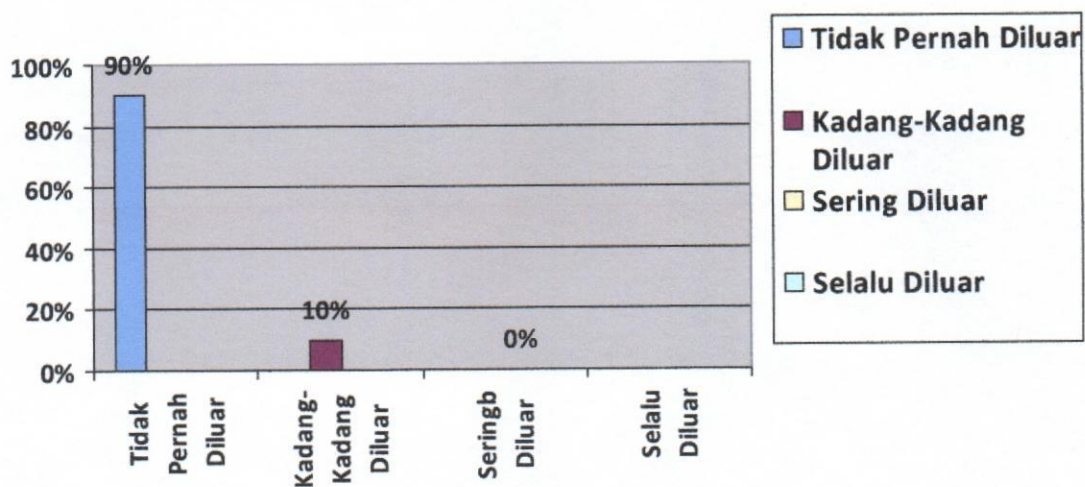
Korupsi.

Tabel 18.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

No	Kinerja	Frekuensi	%
1	Tidak Pernah diluar	101	90%
2	Kadang-Kadang Diluar	11	10%
3	Sering diluar	0	0%
4	Selalu Diluar	0	0%
	Total	112	100%

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang

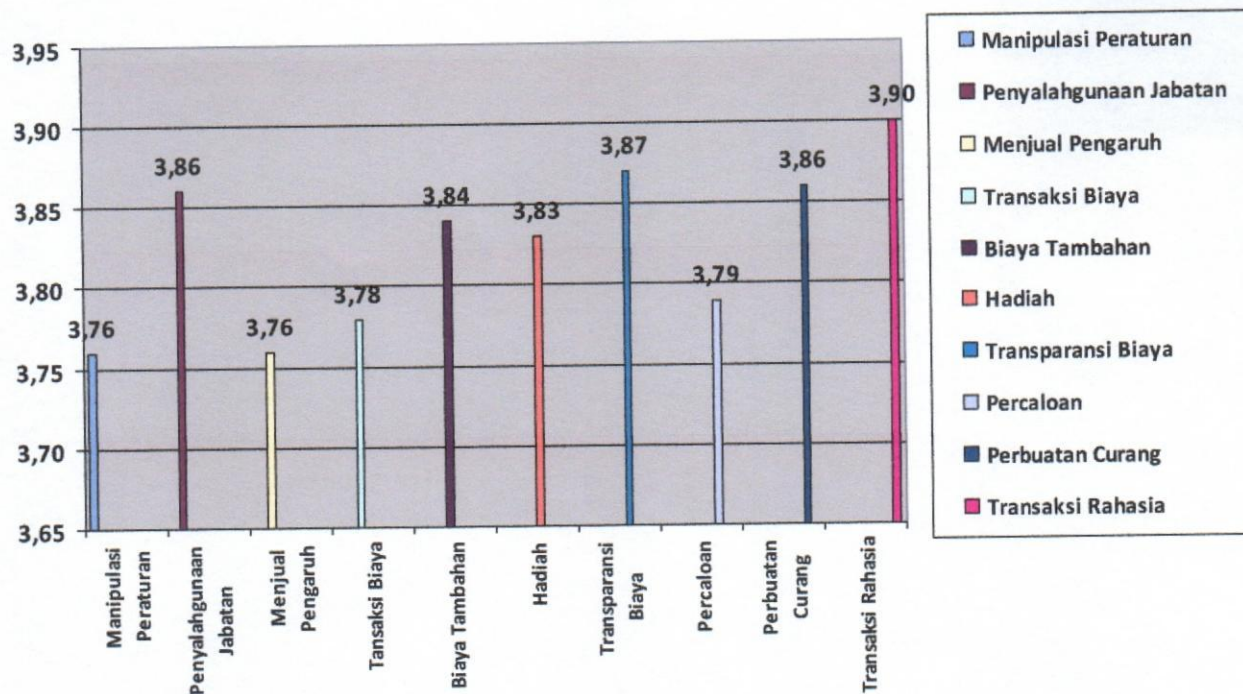
Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri

Tangerang sebesar 3.81

Tabel 19.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Tangerang

No	Unsur Pertanyaan	Nilai	Kategori
1	Manipulasi Peraturan	3.76	Bersih dari Korupsi
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.86	Bersih dari Korupsi
3	Menjual Pengaruh	3.76	Bersih dari Korupsi
4	Transaksi Biaya	3.78	Bersih dari Korupsi
5	Biaya Tambahan	3.84	Bersih dari Korupsi
6	Hadiah	3.83	Bersih dari Korupsi
7	Transparansi Biaya	3.87	Bersih dari Korupsi
8	Percaloan	3.79	Bersih dari Korupsi
9	Perbuatan Curang	3.86	Bersih dari Korupsi
10	Transaksi Rahasia	3.90	Bersih dari Korupsi
	Total	3.823	

**Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Tangerang**



Indeks 3,81 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 – 100.00

Tabel 20.

**Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih

				dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tangerang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Tangerang memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3.823** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3.76**
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3.86**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3.76**
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **3.78**
5. Indikator, Biaya Tambahan mendapat indeks **3.84**
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3.83**
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3.87**
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3.79**
9. Indikator, Perbuatan Curang mendapat indeks **3.86**
10. Indikator, Transaksi Rahasia mendapat indeks **3.90**

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3.86 atau masuk pada persepsi **BERSIH DARI KORUPSI** Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator 3.76 memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

